BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya masyarakat Minangkabau itu memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri, dengan adanya keragaman ras, etnis, suku bangsa dan kebudayaan yang berbeda-beda dari mereka menandakan bahwa pengaturan tentang pola perilaku masyarakat adat juga berbeda-beda di setiap wilayahnya.

Secara etimologi adat berasal dari Bahasa Arab yang berarti kebiasaan, kebiasaan yang secara berulang-ulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan bahkan masyarakat pada umumnya. Dalam adat Minangkabau. Adat dibagi atas empat tingkatan. Adapun empat tingkatan adat di Minangkabau yaitu:¹

1. Adat Nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat adalah adat yang asli, yang tidak berubah, yang *tak lapuk oleh hujan dan tak lejang oleh hujan*. Jika dipaksa keras merubahnya, *ia dicabuik indak mati, diasak indak layua* (dicabut tak mati, dipindahkan tidak layu). adat ini berasal dari aturan dan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya, Muhammad SAW, kemudian rasul menyampaikan kepada umatnya melalui hadits-hadits dan di ajarkan oleh guru kepada muridnya. Adat nan sabana adat bersumber dari syara' (bersumber dari kitabullah) dan sumber alam adalah ketentuan baku dan tidak pernah berubah sepanjang masa. Sumber ini di pakai sebagai timbangan yang baku (cupak usali) yang dijadikan pedoman untuk *mamapek jo manarah* (meluruskan) Cupak Buatan (hukum yang dibuat manusia).

¹ Koentjaraningrat, 1981, "Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan". PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 15.

2. Adat Nan Diadatkan

Adat nan diadatkan adalah aturan dan ketentuan yang mengatur masyarakat yang diwariskan dari perumusan adat minangkabau yaitu Datuak Katumanggungan dan Datuak Parapatiah Nan Sabatang. Adat nan di adatkan ini tidak boleh bertentangan dengan Adat Nan Sabana Adat mengacu pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Sebagaimana pepatah mengatakan : *jikok dicabuik mati, jikok diasak layua* (jika dicabut mati, jika dipindahkan mati), seperti pohon yang telah hidup berakar, yang dapat tumbuh selama tidak ada tangan yang mengganggu hidupnya.

3. Adat Nan Taradat

Adat nan taradat adalah peraturan yang terpakai di dalam *satu luak, atau lareh*, dan atau suatu nagari. Artinya adat nan diadatkan bagian adat salingka nagari yang disebut juga dengan adat *sabatang batuang*. Ini terdiri dari adat nan teradat kan dan adat istiadat ketentuan atau aturan dipakai di *luak nan tigo* atau *di lareh* atau dalam suatu nagari. Dengan demikian adat nan taradat bisa berbeda dari satu nagari dengan nagari yang lainnya. Pada zaman sekarang adat nan taradat bisa berupa Peraturan Daerah atau (Perda) dan Peraturan Nagari atau (Perna) serta hasil musyawarah mufakat/peraturan yang disepakati oleh kerapatan adat.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan nagari setempat yang merupakan ketentuan yang membolehkan kesukaan dan kegembiraan dan permainan anak muda yang sebenarnya tidak selalu disukai oleh adat nan sabana adat. Pengungkapan adat istiadat dilafazkan dalam pahatan kato (yaitu ungkapan kalimat bersambung yang dalam maknanya) dalam bentuk petatah-petitih yang disebut *kato bacari*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa adat istiadat adalah *kato barai, cupak buatan, disukai dan menggembirakan nan mudo*, dikembangkan dari adat nan tiga diatas.²

Di dalam konteks masyarakat hukum adat, R.M. Soeripto mengemukakan bahwa Hukum adat adalah semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis, tetapi oleh

² Fikir ID, 2021, Mengenali Tingkatan Adat di Minangkabau <https://fikir.id/adat/f-5066/adat-nan-ampek-tingkatan-adat-di-minangkabau/>, Diakses pada Tanggal 23 Februari 2025, Pukul 13.00 WIB.

masyarakat itu sendiri dianggap patut dan mengikat bagi para anggota masyarakat lainnya yang bersifat memaksa dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi atau hukuman.³

Begitu juga dengan hukum adat yang ada di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, meskipun hukum adat itu tidak tertulis, tidak di bukukan, tetapi masyarakat mengakui keberadaan hukum tersebut yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini keberadaannya masih diakui dan di taati oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Hukum adat ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam perkawinan.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi serta menyangkut urusan keagamaan.⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum adat itu sendiri tidak hanya mengatur tentang hubungan kepentingan antara dua orang saja, tapi perkawinan menurut hukum adat bisa merupakan hubungan kerabat, keluarga, persekutuan, dan pribadi, semua bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur

³ Dewi Wulansari, 2018, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

⁴ Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, hlm. 90.

tentang perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan tentang masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman pasti ada perbedaan baik antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun masih terdapat perbedaan pengaturan tentang perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁵

Pengaturan tentang perkawinan tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang saja, bahkan di dalam KUHPdata serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga Peraturan Pemerintah (PP) di dalamnya juga terdapat banyak sekali pengaturan tentang perkawinan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan terdapat di dalam Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁵ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Yudisia Vol. 7, No. 2 (Desember 2016) hlm. 414.

Sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan yang terjadi bagi masyarakat yang berdomisili di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat mesti melalui tahapan dan proses "*basuluah jo mato hari, bagalanggan dimato urang rami.*" demikian artinya, prosesei perkawinan bagi masyarakat di Nagari Koto Rajo di samping harus mematuhi aturan agama dan Undang-Undang juga harus mematuhi aturan hukum adat yang berlaku seperti pengaturan tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan.

Adapun bentuk-bentuk perkawinan berdasarkan hukum adat di Minangkabau itu terbagi atas dua yaitu:

a. Perkawinan Ideal

Menurut masyarakat adat minangkabau, perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi antara keluarga dekat seperti anak dan kemenakan. Perkawinan ini akrab disebut sebagai *pulang ka mamak atau pulang kabako*. *pulang ka mamak* berarti perkawinan dilakukan dengan cara mengawini anak mamak itu sendiri, sedangkan *pulang ka bako* berarti perkawinan yang dilakukan dengan mengawini kemenakan ayah.

b. Perkawinan pantang

Perkawinan pantang adalah suatu perkawinan yang dilarang atau suatu perkawinan yang tidak di perbolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat adat minangkabau dikarenakan dapat merusak sistem adat contohnya perkawinan yang dilakuakan dengan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung.⁶

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses perkawinan yang mesti dilalui menurut hukum adat di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

⁶ Asmaniar, 2018, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Binamulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayan, Vol. 7, No. 2, 2018. hlm. 132.

- 1) Maagiah Tau Mamak (memeberi tahu mamak)
- 2) Maantaan Kato (mengantar kata)
- 3) Maantaan Tando (Mengantar Tanda)
- 4) Duduak Sorumah (duduk serumah)
- 5) Duduak Boretong (duduk berhitung)
- 6) Malam Bainai (malam berinai)
- 7) Akad Pernikahan
- 8) Baralek Gadang (pesta pernikahan)
- 9) Monjolang (berkunjung).

Diketahui bahwa dalam proses perkawinan sering di temui berbagai masalah, baik sebelum, ketika dan sesudah dilangsungkan perkawinan. Masalah-masalah tersebut adakalanya datang dari keluarga dan juga masyarakat. Salah satu masalah yang terjadi adalah menyangkut pelaksanaan akad nikah yang memakan waktu sampai beberapa hari.

Berdasarkan tahapan dan proses perkawinan yang mesti dilakukan oleh masyarakat adat yang ada di Nagari Koto Rajo tersebut, ternyata masih ada juga masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa melalui tahapan dan proses tersebut, bahkan perkawinan yang mereka lakukan itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap hukum adat dan norma perkawinan. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana yang diketahui berdasarkan laporan yang di terima oleh tokoh adat tersebut bahwa dalam kurun waktu di tahun 2024 telah terjadi 2 (dua) kasus kawin lari yang dilakukan oleh 2 (dua) pasang kekasih.⁷

Pada sampel pertama berinisial W sebagai (suami) dengan status bujangan yang berusia 20 (dua puluh tahun) sedangkan Y sebagai (istri) dengan status seorang gadis yang berusia 18 tahun. Sebelum terjadinya

⁷ Hasil Wawancara dengan Nawawi selaku Ninik Mamak Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman, tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.

perkawinan seorang laki-laki ini telah membawa kabur seorang perempuan tersebut dari rumahnya. Ternyata seorang laki-laki tersebut adalah kekasih dari perempuan itu sendiri. Mereka adalah sepasang kekasih yang sebelumnya telah menjalin hubungan asmara (yang disebut dengan istilah pacaran) namun diketahui oleh kedua orangtua dari si perempuan ini, dan kedua orangtua dari si perempuan tidak menyetujui hubungan mereka. Sedangkan laki-laki itu juga mendapatkan penolakan dari kedua orangtua perempuan tersebut untuk menikahi putrinya. Akhirnya sepasang kekasih ini memilih dan menempuh jalan lain untuk merealisasikan keinginannya dengan cara kawin lari. Mereka melaksanakan perkawinan di suatu daerah yang bernama Muaro Sungai Lolo.

Pada sampel kedua, perkawinan lari terjadi antara seorang perempuan yang sudah pernah menikah sebelumnya atau yang di sebut sebagai seorang janda berusia 33 tahun, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan pertamanya, dengan seorang pria yang berstatus bujangan dan belum pernah menikah dengan usia 28 tahun yang berinisial T sebagai (suami) dan C sebagai (istri). Pasangan ini melakukan perkawinan di suatu daerah yang bernama Gunung Tua, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.⁸

Kawin lari merupakan salah satu upaya yang dilakukan sepasang kekasih yang ingin melakukan pernikahan akan tetapi salah satu dari kedua

⁸ Hasil Wawancara dengan Nawawi selaku Ninik Mamak Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman, tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.

orangtua atau kedua belah pihak keluarga tidak menyetujuinya, perbuatan ini merupakan salah satu pembangkangan terhadap orangtua sebagai wali dan juga merupakan salah satu penyimpangan terhadap hukum adat yang ada di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

Kawin lari di artikan sebagai praktik perkawinan yang tidak wajar karena jika di lihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan ini jauh dari prosedur yang di tentukan, dan tentunya tidak terlepas dari akibat negatif baik bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum.⁹ Selain tidak sah menurut aturan Undang-Undang, kawin lari juga dinilai tidak sah oleh agama, karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at agama Islam terdiri dari laki-laki dan perempuan yang akan kawin, wali nikah yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan, ijab dan kabul. Menurut *Jumhur Ulama* rukun perkawinan ada lima yaitu kedua calon mempelai, wali si perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul, apabila tidak ada salah satu diantaranya maka perkawinan tersebut tidak sah.¹⁰

Achmad Hadi Sayuti mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka kehadiran wali merupakan salah satu unsur pokok dalam

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, hlm. 9-10.

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, hlm. 64-48.

perkawinan Islam, sehingga wali sangat penting dalam menentukan keabsahan dari suatu perkawinan tersebut.¹¹ Terdapat banyak dalil yang menunjukkan tentang ini, salah satunya hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiallahu anhu, yang mengemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya:¹²

- a. Tidak ada nikah kecuali dengan wali
"Dari Abu Musa, Nabi saw bersabda, " Tidak ada nikah kecuali dengan wali. " (HR Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah) di dalam hadist diatas dijelaskan bahwa tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Untuk itu, pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau istilah lainnya adalah tanpa wali, maka hal itu tentu dilarang.
- b. Batal pernikahan jika tanpa wali
Dari Aisyah ra, Nabi saw bersabda, " siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Jika dia (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka dia (istri) berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari kehalalan kemaluannya. Andai mereka berselisih, maka sultan (penguasa/hakim dan yang mewakilinya) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tarmidzi, Ibnu Majah).
- c. Tanpa saksi dan wali pernikahan tidak sah.
"Tidak (sah) pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi. "(HR. Ahmad). Hadist di atas menunjukkan bahwa pernikahan tanpa saksi dan wali adalah hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT.

Dalam hadist di atas di jelaskan bahwa pernikahan tanpa ada izin wali maka pernikahan tersebut akan menjadi batal. Untuk itu, jika tidak ada wali maka pemerintah atau penguasa atau hakim saat itu bisa menjadi walinya. Hanya saja hal ini bisa dilakukan jika memang sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan memang tidak ada keluarga yang bertanggung jawab.

¹¹ Achmad Hadi Sayuti, 2011, *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab Dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

¹² Maktabah Al Karawanjy, "Wali Nikah (Dalil-Dali Tentang Wali Dalam Pernikahan)"<https://al-karawanjy.blogspot.com/2012/12/wali-nikah-dalil-dalil-tentang-wali.html> dikunjungi pada 6 Mei 2025 jam 15.00.

Apabila masih terdapat keluarga dan orangtua asli dan tidak dilibatkan sebagai wali nikah, tentu Islam melarang dan mengharamkan. Hal ini bertujuan agar melindungi diri perempuan dan juga tidak mendapatkan efek yang mudharat setelahnya.

Islam memberikan syarat untuk adanya wali nikah dan saksi bertujuan agar ada yang melindungi, ada pihak keluarga yang menyaksikan, dan jika di kemudian hari terdapat masalah tentunya akan mudah untuk meminta pertanggungjawaban dan bantuan dari berbagai pihak. Itulah sebabnya sehingga perkawinan di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman mesti melalui tahapan dan proses di samping harus mematuhi aturan agama dan Undang-Undang juga harus mematuhi hukum adat yang berlaku. Dengan terjadinya kasus kawin lari tersebut dapat membuktikan bahwa masih terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap penerapan hukum adat dan norma Islam bagi masyarakat yang ada di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman tersebut yang harus di perbaiki.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah diuraikan diatas dan untuk pengkajian terhadap pencarian fakta yang sesungguhnya, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP KASUS KAWIN LARI YANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI NAGARI KOTO RAJO KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa faktor penyebab dan bagaimana proses terjadinya perkawinan lari di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus kawin lari di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat?
3. Apa sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan kawin lari di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dan proses terjadinya perkawinan lari yang terjadi di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap kasus kawin lari yang terjadi di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui sanksi yang di berikan terhadap pelaku yang melaksanakan kawin lari di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara umum maupun khusus mengenai akibat hukum terhadap kasus kawin lari yang ditinjau dari perspektif hukum adat di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan.
- c. Melatih kemampuan menulis dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penyelesaian terhadap kasus kawin lari agar kedepannya tidak terjadi lagi.
- b. Dengan adanya hasil penelitian ini, semoga dapat menjadi bahan referensi dan literatur oleh mahasiswa lain untuk mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif dan lebih baik lagi untuk masa yang akan mendatang.

E. Metode Penelitian

Penulisan dalam bahasa Inggris disebut *researt*, *researt* adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya bertujuan untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu: ¹³ berdasarkan pengalaman, menanyakan pada orang yang ahli, karena kebetulan dan, berdasarkan penulisan.

Agar bisa tercapai tujuan dari manfaat penelitian, penulis tentunya memerlukan suatu metode untuk mendapatkan data yang lengkap serta relevan. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Sementara pendekatan empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum dengan meneliti suatu kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat. ¹⁴ Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang ditekankan untuk melihat penerapan suatu hukum di dalam masyarakat.

¹³Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 17.

¹⁴Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian hukum empiris (yuridis empiris) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggali pola perilaku nyata yang dialami oleh masyarakat.¹⁵ Sedangkan menurut Salim dan Erlies Septiana, menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggali dan menganalisis terkait perilaku hukum individu maupun masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.¹⁷ Dalam hal ini, akan memberikan gambaran mengenai akibat hukum terhadap kasus kawin lari yang ditinjau dari perspektif hukum adat di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁵ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 81.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 23.

Penelitian Kepustakaan yakni penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang di butuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Sumber bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Reaserch*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang di peroleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui tahap wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Tahap wawancara yang informan lakukan yaitu dengan saudara atau pihak keluarga dari pelaku kawin lari tersebut, beserta salah

¹⁸ Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 86.

seorang tokoh adat sebagai niniak mamak di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

Data Sekunder dapat berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

- 1) Al-Quran
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan

9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini akan sangat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran dan informasi awal mengenai

penelitian yang akan dilakukan serta menguatkan data yang telah diperoleh melalui wawancara. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dimaksud untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini nantinya akan mewawancarai *Datuak Ninik Mamak* dan keluarga pelaku yang ada di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang di berikan oleh narasumber sehingga selama berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan akan diolah dengan cara *editing* yakni memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat di

pertanggungjawabkan dengan kenyataan.¹⁹ Proses *editing* ini dilakukan dengan cara mengoreksi, meneliti, dan menyusun kembali, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar hasil penelitian dapat tersusun secara sistematis dan memperoleh hasil yang valid sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang benar.

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini analisis yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Secara harfiah analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Dalam penelitian ini memaparkan secara jelas dan lengkap dengan mengkaji tentang Akibat Hukum Terhadap Kasus Kawin Lari yang Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Tujuan analisis kualitatif untuk menemukan gambaran dalam bentuk fakta-fakta atas penelitian yang ada dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar.

¹⁹ Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, dan Intan Jacob, *Wawancara Terstruktur atau Semi Terstruktur*, CRMS Indonesia, Bandung, hlm. 1.